



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KETERANGAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASING-MASING TENTANG:

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJP) TAHUN 2007 - 2027
2. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 - 2013

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Hari/Tanggal : Selasa, 22 April 2008

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Balairungsari DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Yth. Sdr. Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Yth. Para Asisten, Kepala Dinas, Pimpinan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Yth. Saudara-saudara Para Wartawan dan Hadirin yang saya hormati.

Selamat Pagi dan Salam Damai Sejahtera untuk kita semua.

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita untuk mengabdikan kepada Bangsa, Negara dan masyarakat dalam keadaan sehat wal'afiat, serta dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat ini dalam rangka penyampaian keterangan Gubernur selaku pimpinan eksekutif terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah masing-masing tentang:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007 - 2027
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 -2013.

Terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah kami sampaikan kepada Dewan yang terhormat melalui Surat pengantar masing-masing:

- Nomor 180.34/1063/ HK-B tanggal 14 April 2008
- Nomor 180.34/1055/ HK-B tanggal 14 April 2008

Pimpinan Rapat dan Hadirin Yang Saya Hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya selaku pimpinan eksekutif menyampaikan keterangan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 - 2027

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara umum pembangunan Kalimantan Barat yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, keamanan dan ketertiban serta lingkungan hidup.

Selain kemajuan yang telah dicapai, masih banyak tantangan dan masalah yang belum terselesaikan dan harus segera diatasi yaitu masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, besarnya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya minat dan realisasi investasi, belum memadainya kualitas dan kuantitas infrastruktur, dan masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan tantangan dan masalah yang dihadapi tersebut, perlu dilakukan upaya bersama baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Barat untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu disusun dan disepakati bersama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun ke depan, yaitu dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2027.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana menyatakan bahwa setiap daerah termasuk Provinsi Kalimantan Barat diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka panjang yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan harus diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2007-2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2027 yang mengacu pada RPJP Nasional dan selanjutnya RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten /Kota serta RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

RPJPD disusun dengan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi dan misi yang disepakati bersama sehingga segala upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan integratif. Di samping itu penyusunan RPJPD juga bertujuan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berangkat dan kondisi tersebut di atas, maka dalam penyusunan RPJPD, arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat ditujukan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan toleran;
2. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip good governance.
4. Mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan infrastruktur yang memadai;
6. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berkeadilan dan berkesinambungan;
7. Mewujudkan perekonomian yang maju;

8. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif;
9. Mewujudkan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan berbudaya.

Untuk melaksanakan arah pembangunan jangka panjang tersebut, perlu ditetapkan tahapan dan skala prioritas. Adapun tahapan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama (2007-2012);
2. Tahap Kedua (2012-2017);
3. Tahap Ketiga (2017-2022);
4. Tahap Keempat (.2022-2027).

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun tetap berkesinambungan dan periode ke periode berikutnya mulai dari penataan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pemantapan serta penyesuaian.

2. Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Barat Tahun 2008-2013

Memperhatikan kondisi riil yang ada serta mengacu kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2007 - 2027, maka sebagai Gubernur Kalimantan Barat periode 2008 - 2013 saya menetapkan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 (lima) tahun ke depan, yakni "Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera".

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan strategi penanganan serta program prioritas untuk peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas Aparatur, peningkatan pembangunan wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan termasuk perdesaan dan perkotaan serta terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati,

Kalimantan Barat menghadapi permasalahan klasik yang hampir dialami oleh provinsi lain di Indonesia, yaitu masalah kemiskinan, tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya infrastruktur, realisasi investasi yang masih rendah serta terbatasnya dana pembangunan pemerintah sehingga pemanfaatan sumber daya alam menjadi belum maksimal. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada kita semua dalam menyusun program dan kegiatan agar lebih fokus kepada permasalahan yang kita hadapi.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, sasaran pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola lapangan pekerjaan serta meningkatnya produktivitas usaha yang efisien dan efektif, peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan dengan mendorong masuknya investor dalam dan luar negeri, peningkatan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan publik, peningkatan pembangunan wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.

Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dan pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk pencapaian IPM, walaupun terjadi peningkatan dari 66,2 pada Tahun 2005 menjadi 67,1 Tahun 2006, namun Kalimantan Barat berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi di Indonesia. Secara rinci nilai IPM merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir, angka kematian bayi tercatat sebesar 46/1000 kelahiran hidup, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, angka rata-rata lama sekolah dan angka rata-rata pengeluaran per bulan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah mengarahkan sasaran pembangunan kepada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan seperti kegiatan revitalisasi Posyandu dan Puskesmas, peningkatan pelayanan dan penerapan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis, peningkatan gizi masyarakat dan lain sebagainya.

Upaya peningkatan kecerdasan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui kegiatan percepatan pelaksanaan wajib belajar dari sembilan tahun menuju dua belas tahun, peningkatan kualitas dan kuantitas guru, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan seperti pengembangan sekolah terpadu dan unggulan, pengembangan wajib belajar paket A dan paket B, dan lain sebagainya.

Pimpinan Rapat dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modalnya di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, salah satu program prioritas yang akan kita kedepankan dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan menggunakan pola sinkronisasi dan sinergitas baik program maupun pembiayaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang direncanakan dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas baik program maupun pembiayaan di bidang infrastruktur antara lain percepatan penyelesaian jalan trans Kalimantan poros selatan, tengah dan utara. Pengembangan akses jalan pada kawasan ekonomi produktif khususnya di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan. Pengembangan sumber daya air melalui konservasi, pengelolaan wilayah sungai serta peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi atau daerah rawa. Pengembangan perumahan dan permukiman Pembangunan pelabuhan internasional dan peningkatan pelabuhan udara. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi serta pengembangan energi listrik di daerah terisolir.

Kebijakan pembangunan yang didukung oleh instrumen perencanaan yang mengacu pada potensi daerah menjadi salah satu faktor yang berperan dalam mendorong kemajuan tersebut. Pembangunan daerah relatif mampu menggerakkan komponen-komponen ekonomi untuk saling bersinergi dalam menggerakkan kegiatan perekonomian. Melalui usaha dan kerja keras kita bersama.

Diharapkan 5 (lima) tahun ke depan pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dapat mencapai angka 7,28 %, pendapatan perkapita mencapai Rp.16,81 juta, Inflasi 4,35. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan investasi sebesar Rp. 22,51 Trilyun yang terdiri dari investasi pemerintah sebesar Rp.10,13 Trilyun dan swasta sebesar Rp. 12,38 Trilyun.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya ingin menyampaikan pesan Bapak Presiden Republik Indonesia pada para Gubernur pada beberapa waktu lalu yang erat kaitannya dengan RPJMD, saya sebagai Gubernur terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan yang harus kita musyawarahkan bersama dalam rencana kerja tahunan khususnya dalam penyusunan RAPBD setiap tahunnya.

Permasalahan yang akan kita hadapi ke depan adalah hal-hal yang berkaitan dengan:

Pertama; ketersediaan pangan, hendaknya masalah ini tidak hanya dikaitkan dengan perubahan iklim semata, tapi yang harus kita cermati adalah tentang perilaku pasar dimana negara-negara penghasil beras memilih untuk tidak mengekspor beras atau kalau dieksporpun dilakukan dengan harga yang sangat tinggi. Jika selalu diekspose bahwa Indonesia selalu kekurangan pangan tentulah pasar akan meresponnya dengan menaikkan harga. Oleh sebab itu, khusus untuk Kalimantan Barat kita harus mengurangi ketergantungan pada beras dengan memanfaatkan sumber-sumber pangan lainnya seperti ketela, talas, sagu, dll. yang tentunya juga harus dipikirkan oleh kita semua baik eksekutif maupun para wakil rakyat yang terhormat ini untuk dapat didiskusikan bersama antara komisi dan SKPD terkait sebagai mitra untuk dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun.

Terkait dengan masalah ketersediaan pangan ini Pemerintah Kabupaten diharapkan menyiapkan lahan seluas minimal 500 ha perkawasan untuk dijadikan lahan pertanian yang sarana dan prasarana pendukungnya diupayakan dapat dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta akan saya sampaikan langsung kepada Bapak Presiden.

Kedua; mengenai masalah energi, diharapkan agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di Kalimantan Barat ini misalnya bagaimana potensi batu bara dan sumber daya air dapat digunakan sebagai bahan pembangkit tenaga listrik di kawasan perbatasan dan kawasan lainnya.

Ketiga; penanganan gizi buruk, untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Daerah mulai dari level terendah hendaknya tanggap dan melaporkan apabila ditemukan kasus kekurangan gizi. Hal ini tentunya perlu dukungan dari para anggota dewan terhormat yang mewakili daerah konstituennya dengan mengenyampingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Termasuk di dalamnya masalah flu burung yang ternyata sangat serius lebih dari yang kita bayangkan karena penularannya sangat cepat dan resiko kematian yang sangat tinggi.

Keempat; penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Pusat melalui berbagai program untuk penanganan masyarakat miskin, telah mengucurkan dana yang sangat besar. Agar dana tersebut terbagi rata kepada masyarakat yang memerlukan, maka perlu dilakukan pendataan penduduk dengan administrasi kependudukan yang lebih baik. Program penanggulangan kemiskinan ini sebaiknya tidak berupa pembagian uang tunai (program bantuan langsung tunai/BLT)

Kelima; khusus masalah dana APBN, bahwa dana yang dialokasikan berupa DAU, DAK dan BOS tahun 2008 tidak dikenai potongan, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keenam; mengenai masalah perbatasan, walaupun antara Pemerintah R.I dan Malaysia menyepakati border Aruk Biawak dan Border Badau-Lubok Antu dapat dioperasikan pada awal Tahun 2009, akan tetapi melihat kondisi di lapangan terutama kesiapan infrastruktur jalan yang ada dan penyediaan lahan yang telah disiapkan, maka border Jagoi Babang - Serikin akan kita usulkan kepada Pemerintah Pusat untuk segera dibuka.

Perlu pula kami kemukakan bahwa RPJMD ini telah melalui tahapan atau proses pembahasan secara teknokratik dan partisipatif, untuk selanjutnya dimohon DPRD dapat memproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati,

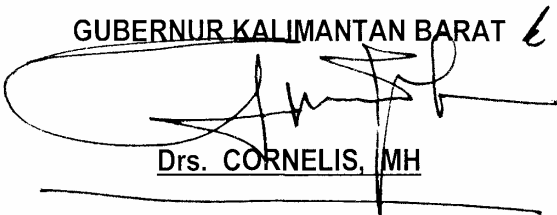
Demikianlah keterangan yang dapat saya kemukakan berkenaan dengan penyampaian 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah ini, untuk dapat dilakukan pembahasan bersama sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Kami berkeyakinan bahwa suatu konsep atau draft pemikiran yang dirumuskan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah ini akan lebih memiliki bobot kesempurnaan yang signifikan manakala terbuka dalam menerima kritikan dan saran yang konstruktif dari semua pihak.

Berkaitan dengan itu, kami mengharapkan Anggota Dewan yang terhormat dapat memberikan sumbang saran pemikiran dan masukan dalam upaya meningkatkan kesempurnaan dan kualitas atas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan tersebut.

Akhirnya atas kesediaan dan ketekunan hadirin yang terhormat dalam mengikuti dan mendengarkan keterangan ini kami ucapkan terima kasih.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menghimbau kepada kita semua untuk membangun komitmen bersama dalam penyusunan program dan kegiatan agar lebih fokus kepada permasalahan yang kita hadapi demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kalimantan Barat.

Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
Drs. CORNELIS, MH